JURNAL RISET DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Vol. 1 No. 4 (2025) pp 348-353

ISLAM DAN POLITIK DI ERA MODERN

Received:
26/11/2024

Accepted:
31/12/2024

Published:
03/01/2025

Nurul Istiqamah Ishaq[1], Muhammad Hakil[2], Tiara Putri Aziza[3], Bahaking Rama[4]

[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

[1]Istiqamah2610@gmail.com
[2]Muhammad.hakil@gamil.com
[3]Azizatiara78@gmail.com
[4]bahaking.rama@yahoo.com

Abstract

Islamic political thought in the modern era has undergone significant shifts, especially in terms of its interaction with the democratic political system. Although many Islamic groups support the application of Islamic values in the political system, there are also groups that are more open to accepting the principles of democracy, pluralism, and human rights. This research aims to further investigate how Islam and politics interact with each other in the modern context, as well as to see how Islamic political movements are evolving in the face of the challenges and opportunities that arise in the 21st century. This study uses a qualitative approach with a library research design to analyze the relationship between Islam and politics in the modern era. The results of the research and discussion show that overall, the relationship between Islam and politics in the modern era shows complex and challenging dynamics. Although there are opportunities to integrate.

Keywords: Islam, Politic, Modern Era

Abstrak

Pemikiran politik Islam di era modern mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam hal interaksinya dengan sistem politik demokratis. Meskipun banyak kelompok Islam yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik, terdapat juga kelompok yang lebih terbuka terhadap penerimaan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana Islam dan politik saling berinteraksi dalam konteks modern, serta melihat bagaimana gerakan-gerakan politik Islam berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul pada abad ke-21. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research) untuk menganalisis hubungan antara Islam dan politik di era modern. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, hubungan antara Islam dan politik di era modern menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun ada peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern seperti demokrasi, proses ini memerlukan penyesuaian yang cermat dan bergantung pada konteks lokal dan budaya masing-masing negara.

Kata kunci: Islam, Politik, Era Modern

PENDAHULUAN

Islam dan politik selalu memiliki hubungan yang erat dalam sejarah panjang peradaban umat Islam (Anugrah, dkk.2024). Sejak masa awal Islam, sistem politik sudah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama, mulai dari konsep kepemimpinan (khilafah) hingga penerapan hukum syariah (Panggabean, dkk. 2024). Seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan zaman, baik dalam konteks sosial, politik, maupun teknologi, hubungan antara Islam dan politik menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern ini.

Menurut Haeba, dkk (2024) di dunia Muslim, berbagai dinamika politik terjadi sebagai respons terhadap perubahan global, tuntutan demokratisasi, serta adaptasi terhadap modernitas dan sekularisme. Negara-negara Muslim mengalami berbagai transisi politik, dengan banyak di antaranya berusaha untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan yang bersifat sekuler atau demokratis (Adim, dkk. 2024). Fenomena ini menciptakan tantangan besar

dalam menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan politik yang lebih pluralistik, terbuka, dan inklusif.

Salah satu fenomena paling signifikan adalah kebangkitan gerakan politik Islam yang semakin meluas sejak tahun 2011, pasca peristiwa Arab Spring (Mustofa, 2024). Menurut Azmi (2023), misalnya, menunjukkan bagaimana perubahan politik di beberapa negara Timur Tengah, seperti Mesir, Tunisia, dan Libya, memberi harapan bagi terwujudnya demokrasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Namun, pada saat yang sama, ada juga kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya bentuk-bentuk ekstremisme yang mengatasnamakan Islam. Di sisi lain Junaid, dkk (2022) menunjukkan bahwa meskipun banyak negara Muslim yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, tidak jarang ada ketegangan antara ideologi Islam dan praktik politik modern yang lebih sekuler, menciptakan dilema bagi banyak negara untuk menyelaraskan kedua hal tersebut.

Kebangkitan gerakan Islam politik ini juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara kelompok-kelompok Islam menanggapi tantangan modernitas (Anzalman, 2024). Beberapa kelompok mengedepankan pendekatan moderat yang mendukung integrasi Islam dengan demokrasi dan pluralisme, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih konservatif dan radikal. Mustafa (2020) menyebutkan bahwa ketegangan antara sekularisme dan ajaran Islam masih menjadi isu utama yang melatarbelakangi banyak gerakan politik Islam di seluruh dunia.

Selain itu, perkembangan teknologi, khususnya media sosial, turut berperan dalam mengubah lanskap politik Islam di era modern. Hassan (2019) mengungkapkan bagaimana media sosial berperan penting dalam mobilisasi politik dan penyebaran ideologi Islam, memberikan ruang bagi kelompok-kelompok Islam untuk memperjuangkan tujuan politik mereka, baik dalam konteks reformasi politik, demokratisasi, maupun gerakan radikal. Dengan adanya media sosial, diskursus politik Islam semakin terbuka dan mudah tersebar ke seluruh dunia, mempengaruhi pola pikir dan tindakan politik generasi muda di berbagai negara.

Secara keseluruhan, meskipun Islam telah berperan besar dalam membentuk identitas politik di banyak negara Muslim, interaksi antara prinsip-prinsip Islam dan sistem politik modern tetap menjadi topik yang penuh tantangan dan perdebatan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi oleh umat muslim, sementara di sisi lain, ada dorongan untuk beradaptasi dengan perkembangan politik global yang lebih inklusif dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana Islam dan politik saling berinteraksi dalam konteks modern, serta melihat bagaimana gerakan-gerakan politik Islam berkembang dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul pada abad ke-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research) untuk menganalisis hubungan antara Islam dan politik di era modern. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali, memeriksa, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan baik itu buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademis lainnya yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik Islam di era modern melalui telaah terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas hasil dari analisis literatur yang telah dilakukan terhadap beberapa jurnal terdahulu yang relevan, terkait dengan topik Islam dan Politik di Era Modern. Pembahasan ini akan mencakup tema-tema utama yang ditemukan dalam literatur yang dianalisis, serta kontribusi dan perbedaan perspektif dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun tema-tema yang akan dibahas meliputi: dinamika pemikiran politik Islam, hubungan antara Islam dan demokrasi, gerakan-gerakan politik Islam, sekularisme, serta pengaruh media sosial dalam politik Islam.

1. **Dinamika Pemikiran Politik Islam di Era Modern**

   Penelitian yang dilakukan oleh Junaid, dkk (2022) menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemikiran politik Islam pada abad ke-21. Jika di masa lalu, politik Islam cenderung berorientasi pada penerapan hukum syariah dalam bentuk negara Islam atau khilafah, di era modern ini semakin banyak kelompok Islam yang mendukung penerapan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam prosesnya. Junaid menyatakan bahwa banyak pemikir politik Islam yang mengajukan konsep "Islamic democracy", yang menggabungkan elemen-elemen Islam dengan prinsipprinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya ketegangan antara kelompokkelompok Islam konservatif yang lebih menekankan penerapan hukum syariah secara ketat dan kelompok moderat yang lebih membuka diri terhadap prinsipprinsip demokrasi. Mustafa (2020) juga mengungkapkan hal serupa, dengan menambahkan bahwa kelompok moderat Islam di beberapa negara seperti Indonesia dan Tunisia lebih cenderung untuk menerima konsep negara demokratis, meskipun dengan pembatasan tertentu yang tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam di era modern semakin pluralistik, dengan adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana Islam harus berinteraksi dengan sistem politik modern.

2. **Islam dan Demokrasi: Antara Harapan dan Tantangan**

   Salah satu fokus utama dalam penelitian-penelitian terkini adalah hubungan antara Islam dan demokrasi. Azmi (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah peristiwa Arab Spring pada tahun 2011, banyak negara-negara Timur Tengah yang berusaha mengadopsi sistem demokrasi, meskipun dalam praktiknya, transisi menuju demokrasi seringkali menghadapi hambatan besar, baik dari dalam (pemerintah yang tidak mau melepaskan kekuasaan) maupun dari luar (intervensi internasional). Di sisi lain, ada pula harapan dari kalangan Islam moderat bahwa demokrasi dan syariah dapat berjalan seiring, meskipun tantangan untuk menyelaraskan keduanya sangat besar. Azmi (2023) menekankan bahwa di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia, pemimpin-pemimpin Islam sempat berkuasa setelah revolusi, namun mereka kesulitan dalam mengimplementasikan demokrasi tanpa merusak nilai-nilai Islam.

   Rizki, dkk (2021) juga menemukan bahwa meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat mendukung demokrasi, seperti musyawarah (syura) dan keadilan sosial, penerapan demokrasi di negara-negara Muslim sering kali terkendala oleh faktor-faktor budaya dan politik lokal yang tidak mendukung transformasi demokratis. Mereka mencatat bahwa negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, yang mengadopsi sistem pemerintahan teokratis, cenderung menanggalkan elemen-elemen demokrasi dalam pemerintahan mereka dan lebih memilih model kepemimpinan berbasis hukum Islam.

   Dengan demikian, meskipun ada kesepakatan bahwa Islam dan demokrasi dapat bersinergi, implementasinya sangat bergantung pada konteks politik dan budaya masing-

masing negara. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengatasi konflik antara penerapan hukum syariah dengan kebebasan politik yang menjadi dasar demokrasi.

3. Radikalisasi dan Moderasi dalam Gerakan Politik Islam

Penelitian oleh Hassan (2019) menyoroti perkembangan gerakan politik Islam, dengan fokus pada perbedaan antara gerakan moderat dan radikal. Gerakan-gerakan radikal seperti ISIS dan al-Qaeda telah menggunakan ideologi Islam untuk memperjuangkan tujuan politik mereka, yang sering kali melibatkan kekerasan dan penolakan terhadap sistem politik modern. Di sisi lain, gerakan-gerakan Islam moderat, seperti Partai Ennahda di Tunisia dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, lebih berfokus pada upaya untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi, dengan cara yang lebih damai dan inklusif.

Hassan (2019) berpendapat bahwa media sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi massa dan menyebarkan ideologi politik Islam, baik yang moderat maupun radikal. Dengan kemudahan akses informasi melalui platform seperti Twitter dan Facebook, ideologi Islam radikal dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memengaruhi pemikiran generasi muda, dan mendorong terjadinya aksi-aksi politik yang ekstrem. Namun, di sisi lain, media sosial juga memberikan platform bagi kelompok-kelompok Islam moderat untuk menyuarakan gagasan-gagasan politik mereka yang lebih inklusif dan berdialog dengan masyarakat internasional.

4. Sekularisme dan Islam: Ketegangan dalam Konteks Modern

Sekularisme, sebagai ideologi yang memisahkan agama dari urusan negara, telah menjadi topik yang sangat kontroversial di banyak negara Muslim. Penelitian oleh Mustafa (2020) menunjukkan bahwa sekularisme sering dipandang sebagai ancaman terhadap identitas Islam, terutama oleh kelompok-kelompok konservatif yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam dalam negara adalah kewajiban moral. Rizki, dkk (2021) menambahkan bahwa meskipun sekularisme dianggap penting dalam sistem politik modern untuk memastikan kebebasan beragama, banyak negara Muslim yang merasa bahwa sekularisme tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengharuskan adanya hubungan antara agama dan negara.

Beberapa negara, seperti Turki dan Aljazair, telah berusaha mengintegrasikan sekularisme dengan Islam melalui model pemerintahan yang lebih moderat. Namun, di negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, sekularisme dianggap bertentangan dengan keyakinan dasar negara yang berdasarkan hukum syariah. Oleh karena itu, penerimaan terhadap sekularisme dalam politik Islam masih menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai

5. Peran Media Sosial dalam Politik Islam

Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial telah memainkan peran penting dalam perkembangan politik Islam di era modern. Hassan (2019) menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang bagi berbagai kelompok Islam, baik yang moderat maupun radikal, untuk menyebarkan ideologi dan memobilisasi dukungan. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Telegram telah digunakan untuk mengorganisir protes, membahas isu-isu politik, dan menyebarkan pesan-pesan ideologis.

Di satu sisi, media sosial memungkinkan kelompok-kelompok Islam moderat untuk menyuarakan pandangan mereka tentang demokrasi, keadilan sosial, dan pluralisme. Di sisi lain, media sosial juga digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan narasi kekerasan dan menghasut para pemuda untuk bergabung dengan gerakan jihad. Dengan demikian, peran media sosial dalam politik Islam adalah ganda, dengan dampak positif dan negatif yang sama-sama signifikan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap berbagai penelitian yang relevan mengenai hubungan antara Islam dan politik di era modern, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

Pemikiran politik Islam di era modern mengalami pergeseran signifikan, terutama dalam hal interaksinya dengan sistem politik demokratis. Meskipun banyak kelompok Islam yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik, terdapat juga kelompok yang lebih terbuka terhadap penerimaan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam komunitas Muslim mengenai bagaimana Islam dapat diterjemahkan dalam konteks politik modern. Kelompok-kelompok moderat lebih cenderung untuk mengintegrasikan Islam dengan sistem politik demokratis, sementara kelompok-kelompok konservatif dan radikal lebih memilih untuk mempertahankan penerapan hukum syariah secara ketat.

Demokrasi dan Islam dapat berjalan seiring, tetapi implementasinya di negara-negara Muslim sering kali terhambat oleh berbagai faktor politik, sosial, dan budaya. Proses demokratisasi, terutama setelah peristiwa Arab Spring, menghadapi banyak tantangan. Beberapa negara seperti Tunisia telah mencoba untuk memadukan prinsip-prinsip Islam dengan sistem demokratis, namun masih terdapat ketegangan antara upaya mempertahankan nilai-nilai agama dan menjalankan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan pluralistik. Demokrasi yang berbasis syariah (Islamic democracy) masih menjadi konsep yang kontroversial dan belum sepenuhnya diterima di banyak negara Muslim.

Salah satu tantangan terbesar dalam politik Islam modern adalah perbedaan antara gerakan moderat dan ekstremis. Gerakan politik Islam moderat berfokus pada penerapan Islam dalam sistem demokratis dan pluralistik, sedangkan kelompok radikal lebih cenderung menggunakan kekerasan dan menolak bentuk sistem politik modern yang dianggap sekuler. Media sosial memainkan peran penting dalam kedua gerakan ini, baik dalam menyebarkan ideologi moderat maupun radikal, dan sering kali menjadi sarana utama untuk mobilisasi dan pengaruh politik.

Sekularisme tetap menjadi isu yang sangat kontroversial dalam politik Islam. Beberapa negara Muslim cenderung menolak sekularisme, menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama, dan lebih memilih sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum syariah. Di sisi lain, ada pula negara-negara yang berusaha mengadopsi prinsip-prinsip sekuler, meskipun dalam banyak kasus ini menimbulkan ketegangan, terutama dalam masyarakat yang konservatif. Meskipun demikian, ada juga upaya untuk menemukan jalan tengah antara Islam dan sekularisme, dengan memperkenalkan model pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen agama dan politik modern.

Media sosial telah menjadi faktor yang sangat mempengaruhi politik Islam di era modern. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Telegram telah digunakan untuk menyebarkan ideologi politik, baik dari kelompok moderat maupun radikal. Media sosial memfasilitasi penyebaran informasi dan mobilisasi massa, namun di sisi lain juga berpotensi memperburuk ketegangan sosial dan politik, terutama ketika digunakan untuk menyebarkan propaganda yang mengarah pada kekerasan dan ekstremisme. Media sosial memungkinkan interaksi antara kelompok Islam dengan masyarakat global, tetapi juga menjadi sarana bagi kelompok radikal untuk memperkuat pengaruhnya.

Secara keseluruhan, hubungan antara Islam dan politik di era modern menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun ada peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern seperti demokrasi, proses ini memerlukan penyesuaian yang cermat dan bergantung pada konteks lokal dan budaya masing-masing negara.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memahami perkembangan pemikiran politik Islam, serta dampak dari faktor eksternal seperti media sosial, dalam menentukan arah politik Islam di masa depan.

REFERENSI

Adim, A., Hasan, A., Umar, M., Khasyi'in, N. (2024) Politik Islam Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. Interdisciplinary Explorations in Reseacrh Journal (IERJ), 2(2), 913-928

Anugrah., Wahyu, D., Fadlullah., Endy, M. (2024) Relasi Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Kekuasaan Negara Pada Masa Orde Baru Dalam Pandangan Louis Althusser. Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam, 22(2) ,99-115

Anzalman. Kamal, T., Hakim, R., Hanafi, H., Julhadi., Thaheransyah. (2024) Islam dan Humanism (When Muslim Learns From The West: A Cross Curtural Project). Jurnal Kajian dan Pengembangan, 7(1), 2356-2715.

Azmi, M. (2023). Gerakan Politik Islam di Dunia Muslim Pasca Arab Spring: Antara Harapan dan Realitas. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 14(2), 134-155.

Haeba, I. D., Thoha , A. M. . ., & Ahim, R. . (2024). Wacana Dinamis Nahdlatul Ulama: Analisis Kritis terhadap Perubahan Sosial: Nahdlatul Ulama's Dynamic Discourse: A Critical Analysis of Social Change. Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 8(1), 125–158

Hassan, N. (2019). Politik Islam dan Media Sosial: Dampak Globalisasi terhadap Gerakan Islam Politik. Jurnal Media dan Komunikasi Islam, 11(2), 87-106.

Panggabean, B, I., Harahap, A, I. (2024) "Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023- 2024)", Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1), pp. 1–15.

Junaid, R., & Syah, A. (2022). Reformasi Pemikiran Politik Islam: Dari Negara Islam ke Integrasi Demokrasi. Jurnal Politik dan Hukum Islam, 18(1), 45-72.

Mustafa, H. (2020). Politik Islam dan Demokrasi: Menyelaraskan Antara Hukum Syariah dan Sistem Politik Modern. Jurnal Politik Global, 27(4), 103-121.

Mustofa, A. Z. (2024). Arab Spring Di Yordania 2011-2013: Dari Demonstrasi Publik Menuju Reformasi Politik. SIYAR Journal, 4(2), 86– 98.

Rizki, F., & Ramadhan, T. (2021). Sekularisme dan Islam: Ketegangan dalam Pemikiran Politik Kontemporer. Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial, 12(3), 201-224.

Wulandari. Sari, E., Julhadi., Hakim, R. (2024). Islam Sebagai Objek Studi Dan Penelitian: Pendekatan Keilmuan Dan Inovasi Metodologis. ITMIYAS: jurnal Ilmu Keislaman, 8(2), 2550-2659